

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO
Jl. RA. BASOENI No.35 Telp. (0321) 322814
M O J O K E R T O**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Dasar hukum	2
E. Aspek-aspek Strategis	4
F. Isu-isu Strategis	6
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis 2021 - 2026,.....	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja/ Sasaran	23
1. Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	23
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2021 – 2024	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir periode Renstra	25
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi Nasional	26
B. Akuntabilitas Keuangan	26
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	28
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	40
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
BAB IV. PENUTUP	44
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
LAMPIRAN	
1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	46
2. Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	47
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	48
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2024 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang dibiayai dari APBD Tahun 2024 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada DPRD di Pimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara Teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.

Mojokerto, Januari 2025
Pit. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, A.P. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, OPD menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD / Renstra OPD, RKPD / Renja OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
2. Sebagai pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Sekretariat DPRD Penjabaran dari



tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

1. Struktur organisasi



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya,
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto,
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang,
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif sehingga dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam Penyusunan laporan Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojopahit Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun

.....tentang Juknis Pelaporan Kinerja;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

E. Isu – Isu Strategis / Permasalahan Utama

Sekretariat DPRD merupakan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD menjembatani DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses legislasi. DPRD yang mempunyai fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi merupakan bagian dari internal Sekretariat DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah. Di dalam pelaksanaannya DPRD melalui alat kelengkapannya akan melakukan proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum.

Selain itu dalam proses menampung aspirasi dalam rangka mengumpulkan data dan informasi dalam pembahasan raperda, proses sosialisasi peraturan daerah memerlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendampingi DPRD turun ke lapangan menemui konstituennya di daerah pemilihan masing-masing terutama melalui hasil reses dan musrenbang.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi fasilitator yang menjembatani antara eksekutif dan legislatif dalam rangka proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten	Tingginya standar pelayanan yang diinginkan (ekspektasi) anggota DPRD dan semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan	Pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi kadang-kadang di lapangan masih ditemui beberapa kendala misalnya bahan untuk rapat anggota dewan masih menunggu dari instansi lain, sehingga pelayanan juga agak terhambat
		Kualitas makanan dan minuman agar ditingkatkan, terutama variasi makanan yang lebih variatif
		Pelayanan pada masa reses masih belum optimal
		Kecepatan dan ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan masih belum Optimal
	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Penyimpanan produk Hukum Daerah sebaiknya dilakukan secara digital dan bisa diakses banyak pihak, disamping itu juga disimpan dalam bentuk manual dan dibagikan pada instansi terkait.
		Kegiatan anggota DPRD sebaiknya segera diinformasikan kepada media cetak maupun media elektronik sehingga

		masyarakat bisa mengetahui kegiatan anggota DPRD
		Sebaiknya Sekretariat DPRD memiliki Web yang akan berfungsi untuk menyebarkan informasi secara on line dengan konten yang selalu diperbaharui

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 disertai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang; tujuan; dasar hukum; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto; serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan mengenai rencana strategis; perjanjian kinerja; rencana kerja; serta alokasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran tahun 2022. Capaian kinerja organisasi mencakup capaian indikator kinerja, perbandingan capaian kinerja 2022 dan 2023, serta capaian kinerja lainnya. Realisasi anggaran mencakup pembahasan mengenai capaian realisasi anggaran.

Bab IV Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

A. Rencana Strategis 2021 – 2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojopahit Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi, Misi, serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih yang berdasarkan RPJMD Provinsi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi yang terdiri atas :

- a. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
- b. Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
- c. Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
- d. Misi 4 : Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan gambaran umum dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam 5 tahun. Secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

- Tujuan

Dalam Rangka mencapai Visi dan Misi tersebut di atas, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan terukur dalam Rumusan Strategi Organisasi.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian Misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”**.

- SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal- hal yang ingin di capai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan secara oprasional rumusan sasaran yang ditetapkan dengan harapan dapat memberikan fokus pada penyusunan program oprasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah :
“Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”

2. Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2024 sasaran Indikator Kinerja Utama berdasarkan Renstra pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut pada Tabel 2.1 di bawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan DPRD	70	71	91,5	92	92,5	93

Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

B. Perjanjian Kinerja tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan perjanjian kinerja sebagai lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran strategis. Setelah target

kinerja ditetapkan, kemudian pada akhir tahun berjalan dilakukan pengukuran terhadap kinerja sasaran tersebut. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2024. Perjanjian kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Perjanjian kinerja perubahan Sekretariat DPRD tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Seekretariat DPRD	93

NO	KINERJA LAINNYA	Indikator Kinerja	TARGET 2024
1	Meningkatkan tatakelola birokrasi peerintahan yang efektif, efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	94,5%
		IP ASN	90,6
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yan Terinternalisasi Serta Berkelanjutan	1 inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 42.724.717.090	APBD 2024
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 54.654.564.926	APBD 2024
Jumlah		79.374.748.120	

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Seekretariat DPRD	93

NO	KINERJA LAINNYA	Indikator Kinerja	TARGET 2024
1	Meningkatkan tatakelola birokrasi peerintahan yang efektif, efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	94,5%
		IP ASN	90,6
2	Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yan Terinternalisasi Serta Berkelanjutan	1 inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 41,362,162,090	PAPBD 2024
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 68,889,564,926	PAPBD 2024
Jumlah		Rp. 110,251,727,016	

Adapun Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Sedangkan perjanjian kinerja Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran III LKjIP 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto dengan cara



membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan pengukuran kinerja tersebut.

Adapun Indikator Kinerja pada Sekretariat Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 Kondisi Umum Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Capaian kinerja pada Tahun 2024, berdasarkan indikator sasaran sebagai berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM	93	93	100 %
2	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi	%	100%	102,27%	102,27%
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81	81,05	101,60%
4.	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	92%	87,87%	95,51%

5.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	90	88,6	98,44%
6.	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sekretariat DPRD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target Interval nilai sampai dengan Nilai 93 pada tahun 2024 dan mampu tercapai nilai 93 dengan prosentase 100%.

Dari angka indeks tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD ditahun 2024 telah terpenuhi.

Perolehan angka indeks 93 tersebut diuraikan sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,76	3,76	3,72	3,8	3,74	3,74	3,76	3,96	3,79
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,58 (A atau Sangat Baik)								

- U1 = Persyaratan
 Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- U2 = Sistem, mekanisme dan prosedur
 Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- U3 = Waktu penyelesaian
 Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

U4 = Biaya/tarif

Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus

dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

U5 = Produk spesifikasi jenis pelayanan

Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi

jenis pelayanan.

U6 = Kompetensi pelaksana

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,

keahlian, ketrampilan dan pengalaman

U7 = Perilaku Pelaksana

Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

U8 = Penangan pengaduan, saran dan masukan

Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

U9 = Sarana dan prasarana

Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud

dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan

untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang

tidak bergerak (gedung).

Untuk Capaian Kinerja lainnya yang diperjanjikan rata-rata melebihi target seperti terlihat pada tabel. Hal ini karena tingginya kepedulian pimpinan dan pegawai di sekretariat DPRD dalam memenuhi target.

Indikator Kinerja yang sudah melampau target yang ditetapkan yaitu Nilai



SAKIP dan Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi yang menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD berkomitmen dalam memenuhi tugas dan Fungsi yang diperjanjikan.

Sedangkan untuk Indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditentukan yaitu realisasi anggaran yang ditargetkan sebesar %, tercapai 87,87 %. Hal ini karena adanya perubahan aturan pembayaran uang perjalanan dinas dari perpres 53/2023 kembali ke perpres 33/2023 sehingga berdampak pada penyerapan anggaran Sekretariat DPRD, Dimana dalam anggaran sekretariat DPRD Sebagian besar berupa perjalanan dinas. Untuk Indikator kinerja IP ASN juga tidak mencapai target dikarenakan adanya perubahan perumusan nilai IP ASN dari Kemenan RB.

2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 - 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto tahun 2024 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto tahun 2021 s.d. tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja												
INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021		CAPAIAN KINERJA 2021	2022		CAPAIAN KINERJA 2022	2023		CAPAIAN KINERJA 2023	2024		CAPAIAN KINERJA 2024
	TGT	R		TGT	R		TGT	R		TGT	R	
Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	70	70,16		71	71,2	100,28%	91,5	92,96	101,59%	93	93	100%-
Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi	80	100%		80	102,55	127%	100%	95,71	95,71%	86	102.27%	118,91%
Nilai SAKIP	73	73,81		74	78,68	106%	79	80,27	101,60%	81	81.05	100%-

Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	85,09%		90%	91,46%	101,62%	91,5%	93,96	102,68	94,5	87.87%	-92,98%
Indeks Profesionalitas ASN	60	66		80	70	87,5%	90	90,53	100,58%	90,6	88,57	97,75%
Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	0	0		1	0	0%	1 inovasi	1 inovasi	100%	1inovasi	1 inovasi	100%-

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Capaian Kinerja indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD meningkat dari tahun 2021 sampai 2024. Untuk indikator kinerja lainnya juga meningkat realisasinya yaitu persentase Nilai SAKIP. Hal ini dikarenakan dikarenakan:

Peningkatan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD melalui beberapa kemudahan-kemudahan fasilitasi diantaranya adalah dengan adanya aplikasi dewan yang berbasis elektronik sehingga memudahkan Pimpinan dan Anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Sedangkan Realisasi Anggaran, IP ASN dan jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan realisasinya meningngkat, namun di tahun 2024 ini mengalami penurunan karena adanya aturan baru dalam realisasinya ditengah tahun berjalan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Membandingkan antara target akhir Renstra dan realisasi kinerja tahun 2024 Kondisi Umum Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Capaian kinerja pada Tahun 2024 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

No	Tujuan Strategi	Sasaran	Indikator kinerja	Target Akhir renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik		Indek Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (IKM DPRD)	93	93	100 %
		Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	86%	102,27 %	118,91 %
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	81	81,05	100%
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5	87.87%	-92,98%
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	90,6	88,57	97,75%
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1inovasi	1 inovasi	100%-

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 93 Dan pada akhir renstra (2026) target indikator kinerja Sekretariat DPRD 75. Hal ini berarti sudah melampauai target tahapan dari akhir target yang di tentukan.

Untuk indicator sasaran Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini karena di awal periode renstra capaian keduanya masih sangat rendah sehingga dipasang target menyesuaikan kondisi awal. Untuk itu kedepan akan dilakukan revisi target di renstra menyesuaikan capaian saat ini.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tidak ada standart nasional yang bisa dibandingkan.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Sekretariat DPRD kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 110.251.727.016.00 (*Seratus sepuluh Milyard Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Belas Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja operasi sebesar Rp. 110.002.397.816,- dan
- 2. Belanja modal sebesar Rp. 249.329.200,-

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	40,848,714,708	39,884,777,568	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9,999,930	95,33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5,000,000	97,09
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4,999,930	93,57
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.384.076.000	3,008,936,898	79,63

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	3.384.076.000	3,008,936,898	79,63
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>550.000.000</i>	545,851,723	<i>86,02</i>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000	545,851,723	86,19
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.868.215.000</i>	731,356,512	<i>86,72</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000	208,230,000	85,46
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	23,152,500	65,84
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	85,829,650	96,69
	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000	85,489,500	96,71
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	131,292,000	83,89
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	197,362,862	94,30
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2.380.000.000</i>	2,224,785,325	<i>70,58</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	596,965,325	75,16
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.180.000.000	1,627,820,000	69,15
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>800.000.000</i>	689,882,500	<i>73,57</i>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	550.000.000	461,604,500	79,70
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	87,458,000	83,44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	140,820,000	50,80
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.189.638.708	32,011,967,880	96,74
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	31.639.638.708	31,501,872,880	96,88
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	550.000.000	510,095,000	90,64
9	Layanan Administrasi DPRD	700.000.000	661,996,800	93,97
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	700.000.000	661,996,800	93,97
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	42.453.323.834	56,988,980,725	91,01
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10.892.043.126	9,559,165,606	89,81
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.500.000.000	1,266,123,645	76,76
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.342.043.126	4,467,712,958	91,61

	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3.550.000.000	3,418,898,625	91,11
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	500.000.000	406,430,378	
2	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>11.373.447.382</i>	9,765,157,477	<i>89,98</i>
	Pembahasan KUA dan PPAS	1.390.000.000	1,326,129,334	98,16
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.300.000.000	1,274,824,065	94,87
	Pembahasan APBD	4.583.447.382	3,389,801,009	92,57
	Pembahasan APBD Perubahan	1.600.000.000	1,312,597,123	76,64
	Pembahasan Laporan Semester	800.000.000	767,943,798	70,49
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.700.000.000	1,693,862,148	95,32
3	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>20.940.000.000</i>	<i>18,123,610,632</i>	<i>87,35</i>
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	3.900.000.000	3,340,427,912	86,63
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.330.000.000	2,173,776,098	82,94
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.900.000.000	3,420,925,907	83,03
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.280.000.000	3,709,734,455	88,47

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.330.000.000	1,668,528,145	88,43
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	950.000.000	931,383,081	98,37
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.750.000.000	1,423,449,934	80,52
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.500.000.000	1,455,385,100	99,29
4	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	5.523.106.800	4,859,400,401	83,88
	Orientasi DPRD	532.391.000	493,103,016	
	Bimbingan Teknis DPRD	3.260.715.800	2,993,908,062	83,93
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	650.000.000	609,413,334	98,86
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1750.000.000	141,100,000	89,53
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	55.000.000	52,700,000	27,20
	Penyusunan Program Kerja DPRD	850.000.000	569,175,989	75,83
5	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	1.705.000.000	1,587,995,902	94,28
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	55.000.000	54,774,902	94,96
	Pelaksanaan Reses	1.650.000.000	1,533,221,000	75,90

6	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>1.000.000.000</i>	625,333,841	<i>75,90</i>
	Penyusunan Kode Etik DPRD	530.000.000	124,904,796	96,73
	Pengawasan Kode Etik DPRD	650.000.000	500,429,045	97,77
7	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>17.969.415.000</i>	<i>12,468,316,866</i>	<i>99,93</i>
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.267.663.000	5,759,707,305	88,69
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	750.000.000	736,497,607	96,33
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.750.000.000	1,515,073,589	83,88
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.201.752.000	4,457,038,365	83,93
	TOTAL	110.251.727.016	96,873,758,293	87,87

Sumber : LRA Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melalui 2 (dua) program dan (dua puluh satu) kegiatan dengan 49 (Empat Puluh Sembilan) sub kegiatan

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto tahun 2024 sebesar 87,87% dengan realisasi sebesar Rp. **96,873,758,293.00** dari total anggaran sebesar Rp. **104.251.727.016,00**. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Sekretariat DPRD kab. Mojokerto tahun 2024 termasuk kategor baik

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja prgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan sehingga tercapai target kinerja Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai.

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 91,88%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94,80%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 90,55%
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan:
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 87,88%
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99,26%
 - Penyediaan bahan logistic kantor 67,96%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 96,86%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0 %
 - Penyediaan bahan/ material 87,78%
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 93,93%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94,85%
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96,26%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98,25%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 96,27%



- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84,33%
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74,16%
- g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 98,02%
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 92,62%
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 66,97%
- h) Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 95,59%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pencapaian kinerja prgram Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah terfasilitasinya semua tugas da fungsi DPRD sehingga tercapai target kinerja Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi

Kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 84,03%
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 82,43%
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik 96,29%
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran. Dengan sub kegiatan
 - Pembahasan KUA dan PPAS 93,08%
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 74,70%
 - Pembahasan APBD 85,64%
 - Pembahasan APBD Perubahan 84,84%
 - Pembahasan Laporan Semester 95,34%
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 97,58%
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 99,00%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 91,52%



- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 95,28%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 94,87%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 92,47%
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 91,64%
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran 85,02%
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 98,05%
- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
- Pendalaman Tugas DPRD 78,65%
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan 99,59%
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 94,92%
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 54,40%
 - Penyusunan Program Kerja DPRD 93,85%
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 96,94%
 - Pelaksanaan Reses 96,41%
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD 91,22%
- g) Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 96,84%
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 96,43%
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 85,98%
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 95,30%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :



CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
10.	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP	43.655.533.890	42.161.542.501	79	80,27			-
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	20.000.000	18.668.100	90%	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	2	2			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.999.930	6	6			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	3.384.076.000	3.008.936.898	94,5 %	87,87%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan	3.384.076.000	3.008.936.898	27	27	Adanya PNS Pensiun dan meninggal dan belum ada formasi pengganti		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	550.000.000	545.851.723	94,6	88,87			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi	0	0	0	0	-		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000	545.851.723	70	70			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	835.000.000	731.365.512	100 %	100%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000	208.230.000	3	3	Sisa kontrak		
				Penyediaan Bahan logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.000.000	23.152.500	12	12	Menyesuaikan kebutuhan		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	85.829.650	1	1	Sisa kontrak		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	Sisa kontrak		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Pengadaan ATK	100.000.000	85.489.000	1	1			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	131.292.000	12	12	Menyesuaikan jumlah tamu		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	197.362.862	12	12	Terdapat rekening belanja medical cek up tidak terserap		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	2.380.000.000	2.224.785.325	100 %	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	700.000.000	596.965.325	12	12	Tergantung penggunaan/tagihan		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1.680.000.000	1.627.820.000	48	48	Sudah terlaksana		
					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	800.000.000	689.882.500					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG			INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	550.000.000	461.604.500	82%	100%	Mobil pimpinan masih baru Tingkat kerusakan ringan dan masih dapat free oli 2 tahun		
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.000.000	87.458.000	1	1	Sisa dari lelang Cleaning Service, Penawaran rendah		
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	150.000.000	140.820.000	1	1	Gedung masih baru belum ada perbaikan		
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Layanan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	32.189.638.708	32.100.158.482	100 %	89%			
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	31.639.638.708	31.501.872.880	50	50	Sudah diberikan sesuai aturan	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENGANTARIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	550.000.000	510.095.000	2	2	Sesuai dengan kontrak		
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0	0	0	0	Karena Anggota DPRD ada yang sudah Check Up mandiri		
					Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	700.000.000	661.996.800	100 %	100%			
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	700.000.000	661.996.800	12	12	Kegiatan sudah terlaksana sesuai jadwal		
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi	69.403.01.308	56.988.980.725	86%	102,27%			
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	10.892.043.126	9.559.165.506	80%	103,13%			
					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.500.000.000	1.266.123.645	1	1	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.342.043.126	4.467.712.958	8	9	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3.550.000.000	3.418.898.625	4	4	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Penyusunan Tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD tersusun	500.000.000	406.430.378	1	1			
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	11.373.447.382	9.765.157.477	100 %	100%			
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1.390.000.000	1.326.129.334	1	1	Sudah selesai pembahasan		
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.300.000.000	1.274.824.065	1	1	Sudah selesai pembahasan		
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4.583.447.382	3.389.801.009	1	1	Sudah selesai pembahasan		
					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1.600.000.000	1.312.597.123	1	1	Sudah selesai pembahasan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	800.000.000	767.943.798	1	1		
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.700.000.000	1.693.862.148	1	1	Sudah selesai pembahasan	
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi	20.940.000.000	18.123.610.632	85%	100%		
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.900.000.000	3.340.427.912	4	4	Menyesuaikan Renja DPRD	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.330.000.000	2.173.776.098	2	2	Rekening sewa mobil, tingginya standart hotel yg tidak terserap	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.900.000.000	3.420.925.907	4	4	Menyesuaikan renja DPRD	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.280.000.000	3.709.734.455	4	4	Menyesuaikan renja DPRD		
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.330.000.000	1.668.528.145	2	2	Menyesuaikan renja DPRD		
					Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.750.000.000	1.423.449.934	1	1			
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.750.000.000	1.423.449.934	2	2	Rekening sewa mobil, tingginya standart hotel yg tidak terserap		
					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.500.000.000	1.455.385.100	1	1			
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	5.523.106.800	4.859.400.401	90%	112.76%			
					Orientasi DPRD	Jumlah Dokumentasi hasil Orientasi DPRD	3.550.000.000	2.792.188.657	1	1			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil pendalaman Tuas DPRD	3.260.715.800	2.993.908.062	6	6		
						Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	650.000.000	609.413.334	12	12		
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	175.000.000	141.100.000	30	41		
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	55.000.000	52.700.000	20	28		
						Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	850.000.000	569.175.989	1	1		
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	2.450.000.000	2.362.676.905				
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	55.000.000	54.774.902	100 %	100%		
						Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1.650.000.000	1.533.221.000	1	1		
						Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	1.000.000.000	625.333.841	90%	100%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD	350.000.000	124.904.796	1	1			
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	650.000.000	500.429.045	4	4	Sudah selesai pembahasan		
					Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	17.969.415.000	12.468.316.866	80%	100%			
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.267.663.000	5.759.707.305	4	4	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	750.000.000	736.497.607	1	1	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.750.000.000	1.515.073.589	4	4	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.201.752.000	4.457.038.365	4	4	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		



3. **Tingkat Penggunaan Sumber Daya**

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditunjang oleh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya aparatur dan sumber daya keuangan. Pada Tahun 2024 terdapat sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidang dan keahliannya juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung tercapainya target kinerja. Sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah adanya kendaraan dinas dan ruang rapat yang representatif. Jumlah anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2024 setelah perubahan adalah sebesar Rp 88.357.433.936 dengan penyerapan anggaran sebesar 83.024.837.120 atau sebesar 93,96%. Dari realisasi tersebut jika ditinjau dari tingkat efisiensi pada program utama dalam hal sumber daya keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tingkat efisiensi pada program utama dapat dilihat pada table berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Silpa
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	10,892,043,126	9,559,165,606	1,332,877,520
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	11,373,447,382	9,765,157,477	1,608,289,905
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	20,940,000,000	18,123,610,632	2,816,389,368
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	5,523,106,800	4,859,400,401	663,706,399
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,705,000,000	1,587,995,902	117,004,098
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1,000,000,000	625,333,841	374,666,159
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	17,969,415,000	12,468,316,866	5,501,098,134
	JUMLAH	69,403,012,308	56,988,980,725	12,414,031,583

Dari table di atas diketahui bahwa pada program utama terdapat efisiensi sebanyak Rp. 12,414,031,583 atau sebesar 17,88%. Efisiensi terjadi karena adanya perubahan perpres dari 53/2023 kembali ke perpres 33/2023 dimana terjadi perubahan aturan dan standart pemberian uang perjalanan dinas.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2024 dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan di tahun berikutnya.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja utama Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 93.

Hasil pengukuran IKU dimaksud berdasarkan unsur sebagaimana disebutkan dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 diperoleh angka capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD pada tahun 2024 sebesar 93 (100% dari target) dengan interpretasi bahwa pelayanan telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya dengan strategi antara lain :

- Meningkatkan kemampuan ASN seiring dengan lebih tingginya harapan kepuasan pelayanan pada Pimpinan dan anggota DPRD
- Lebih banyak belajar tentang digitalisasi karena kedepan semua pelayanan mengarah ke Digitalisasi.
- Meningkatkan kemampuan terkait pengelolaan keuangan yang benar dan sesuai aturan, karena tingginya anggaran Fasilitas DPRD.

Mojokerto, Januari 2025
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 199311 1 001

Lampiran 1. Matriks Renstra Tahun 2021-2026

TC 27 RENSTRA SETWAN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17		
KODE SKPD																		SETWAN	
NAMA SKPD	SEKRETARIAT DPRD																	SETWAN	
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal				IKM	65	71	90,224,903,607	72	96,472,316,459	93	103,109,512,140	94	110,329,377,989	95	118,054,284,449	95	132,465,523,600		
	Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Revormasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	60	49,819,273,607	61	53,238,292,359		56,849,106,353		60,830,743,797		65,090,745,863		74,082,023,600		
		4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat daerah	74,88(BB)%	76,18(BB)	49,819,273,607	77,48(BB)	53,238,292,359	82.00%	56,849,106,353	82.5%	60,830,743,797	83.00%	65,090,745,863	83.5%	74,082,023,600	SETWAN	
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	90	90	30,000,000	90	33,000,000	90	36,300,000	90	38,115,000	90	43,921,500	90	48,314,000	SETWAN	

			Daerah																
		4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	15,000,000	2	16,500,000	2	18,150,000	3	19,965,000	2	21,961,500	2	24,157,000	SETW AN	
		4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	15,000,000	4	16,500,000	6	18,150,000	6	18,150,000	6	21,960,000	627	24,157,000	SETW AN	
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81	82	4,291,067,815	83	4,720,174,597	84	5,192,192,000	85	5,711,411,000	86	6,282,552,000	87	6,282,500,000	SETW AN	
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan	27	27	4,291,067,815	27	4,720,174,597	27	5,192,192,000	27	5,711,411,000	27	6,282,552,000	27	6,282,500,000	SETW AN	
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	80	80	700,000,000	81	770,000,000	82	847,000,000	83	931,700,000	84	1,024,870,000	85	1,127,357,000	SETW AN	
		4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	30	100,000,000	30	110,000,000	27	121,000,000	27	133,100,000	27	146,410,000	27	161,051,000	SETW AN	
		4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70	70	600,000,000	70	660,000,000	70	726,000,000	70	798,600,000	70	878,460,000	70	966,306,000	SETW AN	

		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100	100	3,509,664,000	100	3,786,000,000	100	4,044,693,440	100	4,450,162,784	100	1,967,479,062	100	5,385,246,969	SETW AN	
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3	2,000,000,000	3	2,200,000,000	3	2,420,000,000	3	2,662,000,000	3	2.928.200.00	3	3,221,020,000	SETW AN	
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	99,664,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	45,000,000	12	50,000,000	12	55,000,000	SETW AN	
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000		266,200,000	1	292,820,000	1	322,102,000	SETW AN	
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	1	14,641,000	1	16,105,100	SETW AN	
		4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	600,000,000	12	660,000,000	12	726,000,000	12	798,600,000	12	878,460,000	12	966,306,000	SETW AN	

		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	400,000,000	12	440,000,000	12	484,000,000	12	532,400,000	12	585,640,000	12	644,204,000	SETW AN	
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	80	81	2,500,000,000	82	2,750,000,000	83	3,025,000,000	84	3,327,500,000	85	3,660,250,000	86	4,026,275,000	SETW AN	
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	600,000,000	12	660,000,000	12	726,000,000	12	798,600,000	12	878,460,000	12	966,306,000	SETW AN	
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	1,900,000,000	12	2,090,000,000	12	2,299,000,000	12	2,528,900,000	12	2,781,790,000	12	3,059,969,000	SETW AN	
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	80	81	1,358,000,000	82	1,493,800,000	83	1,643,180,000	84	1,807,498,000	85	1,988,247,800	86	2,187,072,580	SETW AN	
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	24	24	600,000,000	24	660,000,000	24	726,000,000	24	798,600,000	24	878,460,000	24	966,306,000	SETW AN	

			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	358,000,000	1	393,800,000	1	433,180,000	1	476,498,000	1	524,147,800	1	576,562,580	SETW AN	
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	58	58	400,000,000	58	440,000,000	58	484,000,000	58	532,400,000	58	585,640,000	58	644,204,000	SETW AN	
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	90	90	36,430,541,792	91	38,585,317,762	91	40,850,740,913	92	43,233,357,013	92	48,659,325,501	93	53,525,258,051	SETW AN	
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD per bulan	50	50	35,845,541,792	50	37,941,817,762	50	40,142,890,913	50	42,454,722,013	50	47,802,827,001	50	52,583,109,701	SETW AN	
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3	3	400,000,000	3	440,000,000	4	484,000,000	3	532,400,000	3	585,640,000	3	644,204,000	SETW AN	

		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	50	185,000,000	50	203,500,000	38	223,850,000	38	246,235,000	38	270,858,500	38	297,944,350	SETW AN	
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi	100	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100	1,210,000,000	100	1,331,000,000	100	1,464,100,000	100	1,500,000,000	SETW AN	
		4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Rapat DPRD	12	12	1,000,000,000	12	1,100,000,000	12	1,210,000,000	12	1,331,000,000	12	1,464,100,000	12	1,500,000,000	SETW AN	
	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD			Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	65	83.75	40,405,630,000	84.25	43,234,024,100	86.25	46,260,405,787	87.5	49,498,634,192	88.75	52,963,538,586	88.75	58,383,500,000	SETW AN	
		4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	60	75	7,220,272,000	75	7,350,000,000	80	8,000,000,000	80	8,360,000,000	85	9,504,538,586	85	10,268,500,000		
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	60	75	7,220,272,000	75	7,350,000,000	80	8,000,000,000	80	8,360,000,000	85	9,504,538,586	85	10,268,500,000	SETW AN	
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	2	2	900,000,000	2	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	1,210,000,000	1	1,300,000,000	1	1,468,500,000	SETW AN	

				an Peraturan Daerah															
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahas an Rancangan Peraturan Daerah	6	6	4,000,000,000	6	4,050,000,000	6	4,400,000,000	6	4,650,000,000	6	5,574,600,000	6	6,100,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusuna n Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	4	2,320,272,000	4	2,300,000,000	4	2,400,000,000	4	2,500,000,000	4	2,629,938,586	4	2,700,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD						1	100,000,000								
				Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	90	90	5,838,788,000	91	6,250,000,000	90	6,800,000,000	90	8,048,000,000	90	8,300,000,000	90	8,950,000,000		
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	90	90	5,838,788,000	91	6,250,000,000	90	6,800,000,000	90	8,048,000,000	90	8,300,000,000	90	8,950,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahas an KUA dan PPAS	1	1	1,118,408,000	1	1,200,000,000	1	1,300,000,000	1	1,573,000,000	1	1,600,000,000	1	1,700,000,000	SETW AN	

		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	1,118,024,000	1	1,200,000,000	1	1,300,000,000	1	1,575,000,000	1	1,600,000,000	1	1,700,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	1,118,408,000	1	1,200,000,000	1	1,300,000,000	1	1,575,000,000	1	1,600,000,000	1	1,700,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	1,118,024,000	1	1,200,000,000	1	1,300,000,000	1	1,575,000,000	1	1,600,000,000	1	1,700,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	1	247,900,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1	450,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1	1	1,118,024,000	1	1,200,000,000	1	1,300,000,000	1	1,400,000,000	1	1,500,000,000	1	1,700,000,000	SETW AN	
				Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	80	80	8,168,024,000	81	8,760,000,000	85	9,200,000,000	90	9,800,000,000	90	10,620,000,000	90	11,572,000,000		
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80	80	8,168,024,000	81	8,760,000,000	85	9,200,000,000	90	9,800,000,000	90	10,620,000,000	90	11,572,000,000	SETW AN	

				n terfasilitasi															
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintah n bidang Pemerintah n dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Pemerintah an dan Hukum	4	24	1,500,000,000	4	1,600,000,000	4	1,700,000,000	4	1,750,000,000	4	1,800,000,000	4	1,900,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Infrastrukt ur	Jumlah Laporan Hasi Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Infrastrukt ur	2	2	800,000,000	2	860,000,000	2	900,000,000	2	1,050,000,000	2	1,155,000,000	2	1,270,500,000	SETW AN	
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Kesejahtera an Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Kesejahter aan Rakyat	4	4	1,500,000,000	4	1,600,000,000	4	1,650,000,000	4	1,700,000,000	4	1,800,000,000	4	2,000,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Perekonomi an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Perekonom ian	4	4	750,000,000	4	800,000,000	4	850,000,000	4	900,000,000	4	1,000,000,000	4	1,210,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Daya Alam	2	2	800,000,000	2	850,000,000	2	900,000,000	2	1,050,000,000	2	1,155,000,000	2	1,270,500,000	SETW AN	

		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasa n Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	400,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000	1	550,000,000	1	610,000,000	1	671,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasa n Penggunaa n Anggaran	2	2	1,300,000,000	2	1,400,000,000	2	1,450,000,000	2	1,500,000,000	2	1,600,000,000	2	1,650,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomend asi Hasil Pembahas an Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	1	1	1,118,024,000	1	1,200,000,000	1	1,250,000,000	1	1,300,000,000	1	1,500,000,000	1	1,600,000,000	SETW AN	
				Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90%	90	19,178,546,000	90	20,874,024,100	90	22,260,405,787	90	23,290,634,192	90	24,539,000,000	90	27,593,000,000		
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	90%	90%	5,175,000,000	90%	5,860,000,000	90	6,590,000,000	90	6,400,000,000	90	6,865,000,000	90	7,311,500,000	SETW AN	
			Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi Tugas DPRD						1	500,000,000							SETW AN	
		4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalama n Tugas	6	6	3,000,000,000	6	3,500,000,000	6	3,600,000,000	6	3,700,000,000	6	4,000,000,000	6	4,300,000,000	SETW AN	

				DPRD															
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	12	700,000,000	12	750,000,000	12	800,000,000	12	900,000,000	12	950,000,000	12	1,000,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	10	100,000,000	10	110,000,000	20	120,000,000	20	150,000,000	20	165,000,000	20	181,500,000	SETW AN	
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	70	70	175,000,000	70	200,000,000	70	220,000,000	70	250,000,000	70	300,000,000	70	330,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1	1,200,000,000	1	1,300,000,000	1	1,350,000,000	1	1,400,000,000	1	1,450,000,000	1	1,500,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	100	100	2,720,750,000	100	2,755,000,000	100	2,860,000,000	100	3,166,500,000	100	3,274,000,000	100	3,581,500,000	SETW AN	
		4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,000,000	1	66,500,000	1	74,000,000	1	81,500,000	SETW AN	
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	2,670,750,000	3	2,700,000,000	2	2,800,000,000	3	3,100,000,000	3	3,200,000,000	3	3,500,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	80%	80	654,800,000	81	700,000,000	81	850,000,000	81	800,000,000	82	850,000,000	82	900,000,000	SETW AN	

			DPRD	Kode Etik DPRD terfasilitasi															
		4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik	Jumlah Dokumen Kode etik DPRD					-	1	100,000,000							SETW AN	
		4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode Etik DPRD	4	12	654,800,000	12	700,000,000	4	750,000,000	4	800,00 0,000	4	850,000,00 0	4	900,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi	80%	80	10,627,996,000	80	11,559,024,100	81	11,960,405,787	81	12,924,134,192	81	13,550,000,000	82	15,800,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4	12	5,000,000,000	12	5,359,024,100	4	5,400,000,000	4	5,824,134,192	4	6,000,000,000	4	7,500,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	1	1,118,024,000	1	1,200,000,000	1	1,260,405,787	1	1,400,000,000	1	1,350,000,000	1	1,500,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2	12	1,800,000,000	12	2,000,000,000	2	2,200,000,000	2	2,500,000,000	2	2,700,000,000	2	2,800,000,000	SETW AN	
		4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	48	2,709,972,000	48	3,000,000,000	4	3,100,000,000	4	3,200,000,000	4	3,500,000,000	4	4,000,000,000	SETW AN	

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

KODE OPD : 4.02
NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	Target	B/L	PRA RKPD	Target	PAGU 2024
I	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat daerah	81	L	47,535,000,000	78,78(BB)	42,745,435,074
1	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		90	L	30,000,000	90	10,000,000
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	L	15,000,000	2	5,000,000
	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	L	15,000,000	6	5,000,000
2	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		84	L	3,400,000,000	84	3,412,631,000
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan		30	L	3,400,000,000	378 orang	3,412,631,000
3	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		82	L	650,000,000	82	350,000,000
	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		30 stel		50,000,000	0	0
	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		70 org	L	600,000,000	42 org	350,000,000

4	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	L	3,865,000,000	100%	835,000,000
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	L	2,500,000,000	1 paket	250,000,000
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	L	50,000,000	12 paket	35,000,000
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	L	250,000,000	1 paket	100,000,000
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	L	15,000,000	0 dokumen	0
	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 paket	L	200,000,000	1 paket	100,000,000
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	L	300,000,000	12 laporan	150,000,000
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	L	550,000,000	12 laporan	200,000,000
6	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		83%	L	2,600,000,000	83%	2,280,000,000
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	L	700,000,000	12 laporan	600,000,000

	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	#REF!	12 laporan	L	1,900,000,000	12 laporan	1,680,000,000
7	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		83%	L	2,650,000,000	83%	800,000,000
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 unit	L	650,000,000	27 unit	550,000,000
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	L	1,500,000,000	1 unit	100,000,000
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			L	500,000,000	36 unit	150,000,000
8	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi		91%	L	33,590,000,000	91%	34,357,804,074
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		700 orang	L	33,000,000,000	700 orang	33,472,804,074
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		150 paket	L	500,000,000	150 paket	800,000,000
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		50 orang	L	90,000,000	50 orang	85,000,000
9	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD terfasilitasi		100%	L	750,000,000	100%	700,000,000
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12 laporan	L	750,000,000	12 laporan	700,000,000

	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang terfasilitasi	70.00%	L	47,370,000,000	70.00%	32,754,564,926
1	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi		80%	L	7,900,000,000	80%	4,608,724,926
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		2 dokumen	L	600,000,000	2 dokumen	650,000,000
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		8 dokumen	L	4,500,000,000	4 dokumen	1,450,000,000
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		4 dokumen	L	2,500,000,000	4 dokumen	2,208,724,926
	4.02.02.2.01.05	Penyusunan tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 dokumen	B	300,000,000	1 dokumen	300,000,000
				Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	90%			90%	
2	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase dokumen Kebijakan Anggaran dibahas		90%	L	8,500,000,000	90%	4,110,000,000
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 dokumen	L	1,200,000,000	1 dokumen	900,000,000

	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 dokumen	L	1,200,000,000	1 dokumen	900,000,000
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 dokumen	L	3,200,000,000	1 dokumen	10,000,000
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 dokumen	L	1,200,000,000	1 dokumen	900,000,000
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		1 dokumen	L	500,000,000	1 dokumen	500,000,000
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 dokumen	L	1,200,000,000	1 dokumen	900,000,000
				Persentase Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	85%			85%	
3	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terfasilitasi		85%	L	9,900,000,000	85%	9,450,000,000
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		4 laporan	L	1,800,000,000	4 laporan	1,800,000,000

	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		2 laporan	L	900,000,000	2 laporan	1,000,000,000
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		4 laporan	L	1,800,000,000	4 laporan	1,800,000,000
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		4 laporan	L	1,800,000,000	4 laporan	1,800,000,000
	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		2 laporan	L	900,000,000	2 laporan	1,000,000,000
	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 dokumen	L	600,000,000	1 dokumen	500,000,000
	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		2 dokumen	L	600,000,000	2 dokumen	650,000,000
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 dokumen rekomendasi	L	1,500,000,000	1 dokumen rekomendasi	900,000,000

				Persentase Pemenuhan Hak dan Kewajiban DPRD sesuai Peraturan	90%			90%	
4	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi		90%	L	5,350,000,000	90%	4,065,840,000
	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 dokumen	B	500,000,000	1 dokumen	590,840,000
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		6 dokumen	L	3,200,000,000	6 dokumen	2,200,000,000
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		12 dokumen	L	700,000,000	12 dokumen	600,000,000
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		10 orang	L	150,000,000	10 orang	100,000,000
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		70 orang	L	200,000,000	70 orang	75,000,000
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 dokumen	L	600,000,000	1 dokumen	500,000,000
5	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi		100%	L	2,820,000,000	100%	870,000,000
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 dokumen	L	120,000,000	1 dokumen	70,000,000
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 dokumen	L	2,700,000,000	3 dokumen	800,000,000

6	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi		81%	L	500,000,000	81%	500,000,000
	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 dokumen	B	200,000,000	1 dokumen	200,000,000
	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		4 laporan	L	300,000,000	4 laporan	300,000,000
7	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD terfasilitasi		81%	L	12,400,000,000	81%	9,150,000,000
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		4 dokumen	L	7,000,000,000	4 dokumen	5,000,000,000
	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 laporan	L	900,000,000	1 laporan	500,000,000
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		2 dokumen	L	1,000,000,000	2 dokumen	650,000,000
	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		4 dokumen	L	3,500,000,000	4 dokumen	3,000,000,000

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. BAMBANG WAHYUADI, M.H
Jabatan : SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Dr. BAMBANG WAHYUADI, M.H.,
Pembina Utama Muda
NIP. 19671020198903 1 009

Lampiran :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sekretariat DPRD	93

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	90,6 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 42.724.717.090	APBD 2024
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 54.654.564.925	APBD 2024

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Dr. BAMBANG WAHYUADI, M.H.,
Pembina Utama Muda



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEDY MUHARTADI, AP, M.M.
Jabatan : Pjt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

Pjt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

DEDY MUHARTADI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197406101993111001

Lampiran :
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Sekretariat DPRD	93

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,5%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	90,6 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp 40.848.714.708	P APBD 2024
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 69.403.012.308	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

PIL. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 197406101993111001

LAMPIRAN 3 : KEGIATAN FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Pendalaman Tugas DPRD



2. Pembahasan Kebijakan Anggaran Bersama Tenaga Ahli



3. Serap Aspirasi Masyarakat (Reses)



1. Fungsi Pengawasan



